



Dorong Pemprov Tetapkan Rumah Sakit Khusus

DPRD DIJ mengambil sejumlah langkah dalam rangka turut mengantisipasi persebaran wabah Covid-19. Langkah itu antara lain dengan menunda semua agenda kunjungan kerja ke luar daerah dan luar negeri.

"Termasuk kami selektif dalam menerima kunjungan tamu," ungkap Ketua DPRD DIJ Nuryadi di gedung DPRD DIJ, kemarin (18/3). Didampingi dua wakilnya, Huda Tri Yudianta dan Anton Prabu Semendawai, Nuryadi menegaskan, semua agenda per-

jalanan dinas pada Maret ditunda sampai kondisi memungkinkan.

Dikatakan, dewan akan terus bekerja membantu penanggulangan Covid-19. Upaya itu dilakukan melalui komisi-komisi. Misalnya Komisi A berkoordinasi dengan BPBD DIJ dan Komisi B mengadakan pengawasan di bidang ketahanan pangan. Demikian pula Komisi C dan Komisi D akan bertindak sesuai dengan bidang tugasnya.

► Baca Dorong... Hal 7

CEGAH VIRUS DI FASUM: Petugas BPBD DIJ menyemprotkan cairan disinfektan di tempat khusus parkir (TKP) Abu Bakar Ali, Kota Jogja, kemarin (18/3).



UNTUTR AGA TETANA/RADAR JOGJA

Dorong Pemprov Tetapkan Rumah Sakit Khusus

Sambungan dari hal 1

"Kami juga akan berkomunikasi dengan masyarakat, pelaku pendidikan, kesehatan, dan pelaku pariwisata untuk bersama-sama mencegah pandemi ini," tegasnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat terkait penetapan Provinsi DIJ dengan status kejadian luar biasa (KLB), Nuryadi mengingatkan, kewenangan penetapan status itu ada di tangan gubernur. Meski demikian, langkah eksekutif sudah tepat. Penetapan KLB harus disesuaikan dengan kriteria khusus.

"Kami menekankan kepada eksekutif agar menambah fasilitas. Terutama di rumah sakit, seperti ruangan isolasi, alat medis, dan tenaga medis," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Huda Tri Yudianta menambahkan, sangat terbuka dari sisi anggaran. Pemprov dapat melakukan upaya

terbaik guna memenuhi kebutuhan penanganan pandemi virus korona ini.

Dikatakan, perlu ada upaya preventif mencegah meluasnya virus korona. Salah satunya dengan mengosongkan salah satu rumah sakit sebagai tempat khusus penanganan pasien Covid-19. Misalnya RS Grhasia atau rumah sakit pemerintah atau militer lainnya untuk dikosongkan.

"Meskipun masih tergolong sedikit (positif Covid-19), lebih baik kita sudah siapkan rumah sakit khusus dari sekarang," ungkap Huda.

Terkait orang dalam pemantauan (ODP) sebaiknya sudah mendapatkan perlakuan medis yang mumpuni. Selain pasien dalam pengawasan (PDP), ODP juga perlu mendapatkan perlakuan medis guna memastikan kemungkinan terjangkit virus korona. Itu dilakukan demi meminimalisasi

penyebaran virus korona yang lebih luas. "Juga dalam rangka memberikan rasa aman dalam masyarakat," harapnya.

Saat ini orang yang tergolong ODP sudah cukup banyak. Namun ini belum terkaver dalam perlakuan medis khusus. Penambahan fasilitas kesehatan, ruang, dan tenaga medis untuk ketiga golongan ini perlu diberikan sepenuhnya.

Enam Lokasi Parkir Disemprot Disinfektan

Sedikitnya enam lokasi, termasuk tempat khusus parkir (TKP) milik Pemkot Jogja, dibersihkan dan disemprot disinfektan. Ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona (Covid-19).

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, upaya ini sebagai bentuk komitmen Pemkot menjaga seluruh fasilitas publik menjadi higienis. "Kota Jogja tidak menentukan KLB se-

hingga orang dan wisatawan masih datang. Ini kewajiban kita untuk memberikan rasa aman dan nyaman," kata HP di sela kerja bakti di lingkungan TKP, kemarin (18/3).

HP menjelaskan, pembersihan dan penyemprotan dimulai dari tempat parkir, termasuk menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun seperti yang telah ada di kawasan Malioboro. "Kami minta toko, mal, kantor untuk siapkan tempat cuci dan bersihkan kantor-kantor untuk memutus sebaran virus yang nempel-nempel," ujarnya.

Enam lokasi yang dilakukan penyemprotan seperti TKP Abu Bakar Ali, Ngabean, Senopati, Sriwedani, Limaran, kawasan depan BNI, dan TKP selatan Pasar Beringharjo. Sebelum penyemprotan disinfektan dilakukan pembersihan kawasan terlebih dahulu. (kus/wla/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005